

Penerapan *Government Relation* pada PT Orbit Future Academy ***Implementation of Government Relation at PT Orbit Future Academy***

Mahaditha Azzahra Syah^{1*}, Novie Indrawati Sagita¹, Agus Taryana¹

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Sumedang-Indonesia

*Korespondensi: Mahaditha Azzahra Syah, Email: mahaditha21001@mail.unpad.ac.id

(Diterima: 10-07-2025; Ditelaah: 21-07-2025; Disetujui: 07-04-2026)

ABSTRACT

In the era of digital transformation and the Fourth Industrial Revolution, the role of the private sector in supporting national development has become increasingly significant, particularly through strategic synergy with the government. This study in PT Orbit Future Academy (OFA), a company engaged in technology-based education and training, to establish effective relationships with government institutions in order to strengthen its position within the national education ecosystem. This research is a descriptive qualitative approach grounded in the theoretical framework of government public relations, specifically based on the principles of government public relations as outlined in Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation No. 30 of 2011 concerning General Guidelines for Public Relations Governance in Government Institutions. The results show that OFA actively implements Government Relations strategies through partnerships with the Ministry of Manpower, the National Professional Certification Agency (BNSP), the Higher Education Service Institution (LLDIKTI), and regional education offices. Programs such as AWS re/Start, Orbit Skill Center, and Sekolah@2024 demonstrate OFA's tangible contribution to government policy in improving human resource competencies. However, the company still faces challenges, including complex bureaucracy, regulatory misalignment, and the absence of a dedicated Government Relations Officer. This study recommends that OFA develop a more structured Government Relations system, enhance human resource capacity in the field, and expand communication networks with both central and regional government institutions to strengthen cross-sector collaboration in advancing technology-based education and training.

Keywords: Based Educations, Government Relations, Technology

ABSTRAK

Era transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0, peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan nasional menjadi penting, khususnya sinergi dengan pemerintah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT Orbit Future Academy (OFA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, untuk membangun hubungan strategis dengan lembaga pemerintah guna memperkuat posisinya dalam ekosistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan teoritis Kehumasan Pemerintahan berbasis asas Kehumasan Pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Delapan indikator utama yang dijadikan acuan analisis yaitu Keterbukaan, objektivitas, kejujuran, tepat janji, etika, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Orbit Future Academy secara aktif menerapkan strategi *Government Relations* melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Dinas Pendidikan. Program-program seperti *AWS re/Start*, *Orbit Skill Center*, dan *Sekolah@2024* menjadi bukti nyata keterlibatan PT Orbit Future Academy dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa birokrasi yang kompleks, perbedaan regulasi, dan kurangnya tenaga khusus pada posisi *Government Relations Officer*. Penelitian ini merekomendasikan agar PT Orbit Future Academy mengembangkan sistem *Government Relations* yang lebih struktural, meningkatkan kapasitas SDM di bidang *Government Relations*, serta memperluas jaringan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi.

Kata kunci: Kehumasan, Pendidikan, Pemerintahan, Teknologi

PENDAHULUAN

Era globalisasi serta transformasi digital, hubungan antara sektor swasta dan pemerintah semakin krusial untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Government Relations (GR) atau hubungan dengan pemerintah menjadi sebuah strategi terpenting bagi perusahaan untuk menciptakan relasi yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Dalam hal ini, Government Relations sejatinya merupakan implementasi dari fungsi kehumasan pemerintahan seperti upaya menjalin komunikasi dua arah yang konstruktif antara sektor non-pemerintahan dengan lembaga pemerintahan. Menurut Ghiffari, (2024) fungsi utama dari government relations meliputi peningkatan transparansi, memperkuat akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, serta menggalang dukungan untuk kebijakan dan program pemerintah. Dalam praktik, humas pemerintah sehari-hari, informasi yang biasa disajikan adalah berita mengenai program, kebijakan, hingga kegiatan pemerintah, baik yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh instansi tersebut (Anam et al., 2023).

PT Orbit Future Academy memegang peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di era digital. Namun, untuk mencapai tujuannya, perusahaan ini harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, mengingat regulasi dan kebijakan pemerintah sangat dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan bisnis PT Orbit Future Academy.

Salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah menciptakan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi. Inisiatif seperti Making Indonesia 4.0 dan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan komitmen pemerintah dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi (Setyaningrum & Haryanto, 2024).

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang ini, PT. Orbit future Academy memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, untuk memaksimalkan perannya, perusahaan perlu memahami dan menerapkan strategi Government Relations yang efektif.

PT Orbit Future Academy sedang melakukan Kerjasama dengan Institusi Pemerintahan Pusat dan daerah. Pada bulan maret 2024, PT Orbit Future Academy bekerja sama dengan 17 LLDIKTI terkait program aplikasi *OSC (Orbit Skill Center)* yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan, khususnya di Industri 4.0, serta menjembatani kesenjangan keterampilan antara Pendidikan dan kebutuhan industri yang di dalam aplikasinya terdapat berbagai kursus *online* dan program yang dirancang untuk membantu peserta mencapai tujuan karir mereka. Kemudian, pada bulan Juni 2024, PT Orbit Future Academy juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta Stankomrogrlat dalam rangka pengembangan program sertifikasi berbasis internasional yang mengadopsi AWS. Melalui kolaborasi dengan PT Orbit Future Academy dan Amazon Web Services (AWS) dalam program AWS re/Start, Kemnaker berharap secara bertahap dapat mengatasi persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia, sekaligus menutup kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dengan kompetensi dunia kerja saat ini. selain itu juga, masih pada bulan juni 2024, PT Orbit Future Academy menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program festival budaya bagi siswa SMA dan SMK sederajat di DKI Jakarta. Dalam kerja sama ini, peran Dinas Pendidikan adalah membantu menerbitkan

surat penyebaran informasi serta audiensi kepada satuan Pendidikan agar mendukung dan berpartisipasi dalam festival yang diselenggarakan oleh PT Orbit Future Academy.

Studi ini akan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang praktik GR di PT. Orbit Future Academy. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi PT. Orbit Future Academy, tetapi juga bagi perusahaan lain yang bergerak di sektor pendidikan dan teknologi.

MATERI DAN METODE

Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur = seluruh aparat) sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit (Solihah, 2024).

Sedangkan menurut Haerah, (2023) sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara.

Administrasi Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa definisi dari Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Menurut Rimelle dari *Gesellshchaft fur Technische*

Zusammernarbeit (GTZ), bahwa Indonesia memerlukan UU Administrasi Pemerintahan ini sebagai salah satu instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, layaknya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Humas Pemerintah

Humas pemerintah menurut Susanto dalam Azzahra et al., (2024) menyampaikan bahwa "humas pemerintah atau government public relations dalam hal kegiatan, yang ditujukan untuk menghasilkan pendapat dan iklim pendapat yang mendukung instansi.

Kehumasan Pemerintah secara makna sama dengan Hubungan Masyarakat akan tetapi yang membedakan adalah Dimana kehumasan pemerintahan lebih fokus kepada hubungan terhadap pemerintah atau dapat diartikan juga sebagai penghubung atau jembatan antara organisasi, Masyarakat, perusahaan dengan pemerintah. Kehumasan pemerintah adalah suatu fungsi manajemen yang didirikan dengan tujuan untuk membangun serta memelihara hubungan yang baik antara pemerintah dengan Masyarakat, instansi, maupun organisasi. Kehumasan Pemerintah melibatkan berbagai aktivitas komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan kebijakan kebijakan, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Desain Penelitian

Menurut Sugiyono, (2022) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Menurut Adiputra et al., (2021) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

mendeskrripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.

Metode pengumpulan data dapat dikatakan sebagai strategi peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperuntukan untuk mencapai tujuan penelitian (Daruhadi & Sopiati, 2024). Metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pengamatan yang dilakukan penulis berupa catatan peristiwa, maupun perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh objek pengamatan, menurut Arikunto, (2019) pengamatan langsung terhadap suatu objek atau situasi yang sedang berlangsung di lingkungan, dengan menggunakan alat indera, baik secara sengaja maupun sadar, serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Selain itu melakukan studi pustaka. Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono, (2019) studi kepustakaan berkaitan dengan penelitian dan referensi lain seperti buku, majalah dan literatur. Data yang diperoleh dari buku literatur yang ada hubungan dengan tugas akhir pada Program Studi Administrasi Pemerintahan dan buku-buku perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas yang mengacu pada kerangka teori kehumasan pemerintahan, sebagaimana dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi*

Pemerintahan dan PER/12/M.PAN/08/2007 tentang *Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah*. Teori Kehumasan Pemerintahan penulis gunakan sebagai kunci indikator untuk menganalisis bagaimana penerapan *Government Relations* dalam konteks komunikasi dua arah antara organisasi dan instansi pemerintah, dengan menilai prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi publik. Sejalan dengan pendapat

Menurut Lani & Handayani, (2021) Hubungan Masyarakat harus mampu menguasai keterampilan teknis dalam menyebarluaskan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Hubungan Masyarakat. Dalam pendekatan ini, Hubungan Masyarakat dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, meliputi komunikasi interpersonal, publik, kelompok, media massa, baik cetak maupun audio visual dan Media Baru.

Tujuan dari membuat surat rekomendasi kerjasama yaitu untuk memperkenalkan program "*Orbit Skill Center*", yang begitupun menjelaskan tentang manfaat serta tujuan dari kerjasama yang akan dijalin antara PT. Orbit Future Academy dan masing-masing LLDikti terkait wilayah 1 hingga wilayah 17.

Proses penulisan draft surat rekomendasi ini melibatkan perhatian khusus terhadap struktur kalimat dan penggunaan kata yang tepat, agar isi surat dapat tersampaikan secara jelas dan profesional. Selanjutnya, setelah draft surat selesai dibuat dengan menyesuaikan masing-masing nama ketua Lldikti wilayah 1-17 lanjut memasuki tahap pemeriksaan langsung oleh mentor ibu Maria selaku *Director of Government Relations & Project* yang bertanggung jawab atas penulisan surat rekomendasi tersebut. Ibu maria memberikan masukan serta koreksi terkait gaya bahasa, kesalahan ketik (*typo*), serta

kesesuaian kata yang digunakan. Pemeriksaan ini juga merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa surat yang akan dikirimkan ke LLDikti memiliki kualitas yang baik dan mencerminkan citra positif dari Orbit Future Academy itu sendiri. Proses ini lumayan memakan waktu karena penulis harus menunggu persetujuan dan perbaikan dari mentor sebelum surat dapat dianggap final. Berikut merupakan salah satu dari 17 contoh surat rekomendasi LLDikti yang dibuat:



Gambar 1 Surat Rekomendasi
Sumber : Diolah Penulis, 2024

Selain melaksanakan tugas administratif seperti pengumpulan data dan pembuatan surat rekomendasi kerja sama, penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan resmi dan kunjungan rapat kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun mitra perusahaan, terutama dalam kapasitas mendukung fungsi divisi *Government Relation*. Salah satu dari banyaknya rapat kerja yang penulis jalani selama kegiatan unjuk kerja ini yaitu pertemuan koordinasi dengan lembaga Stankokmpoglat (Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan) dari kementerian

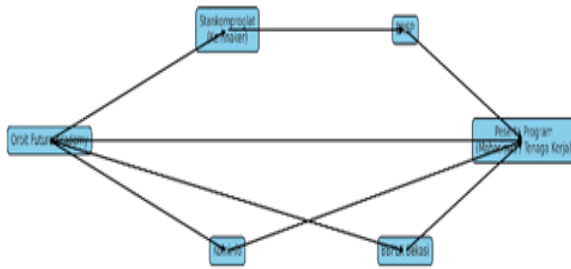
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kemungkinan kerja sama dalam pelaksanaan program *Orbit Future Academy* yaitu program AWS for ASEAN, yang merupakan sebuah inisiatif pelatihan berbasis teknologi *cloud computing* dari *Amazon Web Services (AWS)* yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Diskusi dalam rapat tersebut yaitu mencakup beberapa aspek penting, salah satunya yaitu rencana untuk mengintegrasikan program pelatihan AWS for ASEAN dengan sistem sertifikasi profesional yang dikelola oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Orbit Future Academy, bersama pihak Stankomproglat, sepakat bahwa pelatihan ini memiliki daya saing serta pengakuan resmi di mata industri kerja maupun institusi pendidikan, maka dengan itu dibutuhkan sertifikasi yang berlisensi dan terstandarisasi oleh BNSP. Dari kerjasama ini juga pihak kami mengharapkan BNSP untuk dapat mengesahkan Program ini dengan memberikan cap atau logo Garuda sebagai simbol legalitas nasional dan pengakuan resmi dari negara.

Sebelum memulai pengajuan resmi kepada BNSP dilakukan, tim dari Orbit Future Academy dan Stankomproglat bekerja sama dalam menyusun pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan standar yang dipakai di nasional. Proses penyusunan skema ini meliputi penelaahan konten konten kurikulum AWS yang menggunakan standar internasional, kemudian disesuaikan dengan unit kompetensi yang tercantum pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) bekasi juga turut serta berkolaborasi juga dalam program ini agar memastikan bahwa seluruh konten pelatihan yang digarap

sejalan dengan kebutuhan industri digital nasional serta selaras dengan infrastruktur pelatihan vokasi yang dimiliki pemerintah.

Berikut merupakan gambaran alur hubungan antar lembaga dan arah harmonisasi yang dilakukan oleh Orbit Future Academy dalam Program kerja sama AWS for ASEAN bersamaan dengan pihak-pihak pemerintahan terkait:



Gambar 2 ilustrasi peta relasi Program AWS for ASEAN

Dalam skema tersebut, dapat dilihat peran sentral PT. Orbit Future Academy yang menginisiasi kerja sama dengan berbagai pihak strategis, mulai dari Stankomproglat sebagai representasi Kemnaker, BNSP sebagai lembaga sertifikasi nasional, hingga Kominfo dan BBPLK Bekasi sebagai mitra dalam harmonisasi kurikulum dan pelatihan.

Analisis dan Pembahasan Terkait Penerapan *Government Relation* Pada PT. Orbit Future Academy Berdasarkan Asas *Kehumasan Pemerintahan*

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis *Kehumasan Pemerintahan* berbasis asas *Kehumasan Pemerintahan*, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola *Kehumasan* di Lingkungan Instansi Pemerintah. Delapan indikator utama yang dijadikan acuan analisis yaitu Keterbukaan, objektivitas kejujuran, tepat janji, etika, profesionalisme, akuntabilitas, dan

integritas (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2011).

Teori *Kehumasan Pemerintahan* yang dipakai sebagai kerangka analisis dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang standar komunikasi publik yang profesional, etis, dan transparan, yang dapat diadopsi oleh lembaga non-pemerintah dalam berinteraksi dengan instansi pemerintah. Asas-asas tersebut bukan hanya merefleksikan nilai-nilai normatif dalam tata kelola komunikasi kelembagaan, tetapi juga dapat menjadi sebuah acuan praktis dalam melihat efektivitas pelaksanaan penerapan *Government Relations* pada PT Orbit Future Academy. Hal ini sejalan dengan pendapat Sani et al., (2020) humas merupakan ujung tombak atau sebagai corong yang harus dapat menghubungkan baik pihak internal, maupun pihak eksternal di pemerintahan itu sendiri. Penerapan *Government Relations* pada PT Orbit Future Academy berdasarkan indikator asas *Kehumasan Pemerintahan*. Serta mendukung penelitian (Prastowo, 2020) dimana peneliti merekomendasikan agar lembaga Pemerintah mengoptimalkan media online sebagai sarana untuk menyebarkan informasi pada publik. Begitu pula dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik. *Humas* pemerintah sudah hakikatnya untuk menjalankan fungsi ini, maka sudah seharusnya lembaga Pemerintah bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Hal yang harus diperhatikan oleh praktisi humas dalam pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi antara lembaga dan masyarakat adalah dengan menggunakan komunikasi dua arah juga bertindak sebagai negosiator bukan hanya sebagai komunikator. Menurut Nugraha & Novianti, (2022) revitalisasi humas menyangkut pada upaya mengembalikan kembali sangat pentingnya peran humas pada suatu lembaga (state of being). Sedangkan

transformasi humas menunjukkan pada aspek perubahan mendasar dan upaya mengubah kinerja humas pada suatu lembaga.

Keterbukaan Informasi

Di PT Orbit Future Academy, keterbukaan diwujudkan secara konkret melalui penyampaian informasi yang komprehensif kepada mitra pemerintah sejak tahap awal peninjauan kerja sama. Informasi tersebut disampaikan melalui proposal resmi, paparan program, hingga dokumen pendukung seperti profil perusahaan, kurikulum pelatihan, rencana pelaksanaan kegiatan, hingga latar belakang sosial program.

Menurut Pandiangan & Ratnasari, (2023) implementasi keterbukaan informasi publik dalam tugas humas pemerintah adalah dengan melakukan transparansi informasi. Dengan menjalankan transparansi informasi, publik dari akan lebih percaya terhadap institusi.

Objektivitas

Di PT Orbit Future Academy, prinsip objektivitas menjadi bagian dari standar operasional internal dalam pelaksanaan tugas-tugas GR. Divisi Government Relations tidak hanya berfungsi sebagai perantara komunikasi, tetapi juga sebagai pengelola hubungan kelembagaan yang dituntut bersikap netral, adil, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh instansi pemerintah yang menjadi mitra.

Jujur

Pada PT Orbit Future Academy, asas kejujuran tercermin secara kuat dalam sikap organisasi yang terbuka terhadap kondisi internalnya sendiri, termasuk saat menghadapi keterbatasan atau tantangan implementasi program. Sikap ini ditunjukkan bukan hanya dalam bentuk komunikasi internal, tetapi juga dalam interaksi langsung dengan mitra pemerintah, bahkan saat informasi tersebut

belum ideal atau tidak sepenuhnya menguntungkan bagi citra organisasi

Tepat Janji

PT Orbit Future Academy menunjukkan implementasi prinsip ini dengan jelas melalui berbagai tindakan dalam disiplin kerja pada pengelolaan hubungan dengan instansi pemerintah. Salah satu contoh komitmen perusahaan dalam menepati janji kerja sama terlihat dari bagaimana seluruh proses administrasi, penyampaian informasi, hingga eksekusi program selalu diarahkan pada ketepatan waktu serta kepatuhan terhadap kesepakatan awal

Etika

Di PT Orbit Future Academy, asas etika diinternalisasikan sebagai standar perilaku kelembagaan, yang tidak hanya berlaku dalam komunikasi tertulis, tetapi juga dalam pertemuan luring, forum daring, ataupun saat menyampaikan proposal dan laporan. Tim GR pun harus mengetahui bahwa kita sebagai seorang Government Relation officer bertindak atas nama institusi dan harus dapat menjaga keharmonisan interaksi dengan pihak pemerintah, mulai dari cara berpakaian, tata bahasa komunikasi, hingga penempatan diri dalam struktur formal.

Hal ini didukung dengan penelitian Machmudah et al., (2024) bahwa profesional humas harus memahami etika humas dengan baik melalui pelatihan atau pembelajaran mandiri untuk melaksanakan tugas secara efektif dan etis, selalu mengupdate informasi dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

Profesionalisme

Profesionalisme di PT Orbit telah ditanamkan melalui praktik kerja yang terstruktur secara sosial dan fungsional. Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks Government Relations, profesionalisme bukan hanya diukur dari dokumen tertulis,

tetapi dari etika kerja nyata, keterampilan adaptasi, dan kepatuhan terhadap standar hubungan kelembagaan yang sehat. Sejalan dengan penelitian (Yolandita et al., 2023) bahwa implementasi strategi public relations dengan melaksanakan program-program yang mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat serta inovatif di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan dan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya memiliki relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain dan sering kali menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Chernysh et al., (2020) dan Meng & Berger, (2022) dalam penelitiannya masing-masing memberikan wawasan tentang bagaimana kepercayaan dan kepuasan profesional dapat dibangun dalam lingkungan digital, yang relevan untuk membahas bagaimana humas dapat meningkatkan hubungan dengan publik melalui komunikasi digital yang beretika

Akuntabilitas

Di PT Orbit Future Academy, tidak terdapat sistem pelaporan GR yang sepenuhnya tertulis dalam bentuk prosedur baku, namun komitmen terhadap transparansi dan pertanggungjawaban tetap dipegang secara konsisten. Setiap kali program kerja sama dijalankan, pihak GR menyusun laporan kegiatan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada instansi mitra. Laporan ini disiapkan secara naratif dan didukung oleh data-data seperti daftar peserta, dokumentasi visual, serta hasil umpan balik peserta dan mitra. Sebab menurut Azhary, (2020) penyampaian informasi, baik online maupun offline membutuhkan kerangka acuan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang kehumasan dalam meningkatkan pengelolaan komunikasi digital yang informatif dan dialogis serta mampu menjalin hubungan baik dengan publik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi.

Integritas

PT Orbit Future Academy mengupayakan nilai ini melalui pendekatan yang lebih berbasis pada norma kelembagaan dan batasan etis tidak tertulis, daripada peraturan formal atau instrumen pengawasan khusus. Dengan kata lain, integritas di Orbit dibentuk melalui pembiasaan sikap organisasi yang menolak praktik manipulatif atau oportunistik, khususnya dalam hubungan dengan pemerintah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lani & Handayani, (2021) bahwa untuk mewujudkan Bagian Humas yang ideal seperti perusahaan swasta, maka humas pemerintah pusat/daerah harus benar-benar diberdayakan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan SDM Bagian Humas, mengubah paradigma yang keliru tentang humas, peningkatan sarana dan prasarana, koordinasi pengelolaan informasi dan komitmen dari pimpinan

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

PT Orbit Future Academy menunjukkan upaya proaktif dalam menjalin hubungan dengan pemerintah melalui komunikasi yang terencana, seperti kunjungan, pertemuan tatap muka, dan diskusi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, yang bertujuan membangun pemahaman bersama dan mengidentifikasi potensi kerja sama. Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik *Government Relations* yang dijalankan oleh PT Orbit Future Academy, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan seluruh asas kehumasan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Implikasi hasil penelitian Mengadopsi sistem penyimpanan dokumen digital berbasis cloud (seperti Google

Drive/OneDrive internal perusahaan) untuk mengarsipkan surat, laporan kegiatan, dan notulensi audiensi, sehingga mudah diakses oleh tim dan mempercepat proses pelaporan ke mitra. Mengadakan pelatihan internal minimal 2 kali dalam setahun untuk seluruh anggota tim GR mengenai pembaruan regulasi pemerintah, teknik komunikasi formal lintas instansi, dan etika kehumasan sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, Oktaviani, N. W., & Wiwik, N. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Anam, K., Astuti, P., Hermintoyo, M., & Astuti, S. P. (2023). Analisis Sarana Kohesi Leksikal dalam Teks Berita Humas di Website Kanwil Kemenag Jawa Tengah. *In NUSA*, 17(1).
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Azhary, S. (2020). Strategi pemeliharaan relasional dalam kegiatan public relations online badan publik di Indonesia. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 193. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.19558>
- Azzahra, N. P., Adwiyah, S. El, & Muksin, N. N. (2024). Pengaruh Humas Pemerintah Dalam Program Rumah Umum Tidak Layak Huni Terhadap Citra Pemerintah. *SABER : Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 221–232. <https://doi.org/10.59841/saber.v2i2.998>
- Chernysh, R., Pogrebnaya, V. L., & Montrin, I. (2020). Development of internet communication and social networking in modern conditions. *Institutional and Legal Aspects. Revista San*, 3(2). <https://doi.org/Retrieved> from <https://eprints.cdu.edu.ua/4910/>
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>
- Ghiffari, F. (2024). Strategi Government Public Relations oleh Dinas Sosial DKI Jakarta (Studi Pada Akun @pusdatinkesosdki Dalam Memberi Sosialisasi Mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). *CommLine*, 9(1), 78. <https://doi.org/10.36722/cl.v9i1.3021>
- Haerah, K. (2023). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Pemerintahan*. FISIP Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2011). *KepMenPANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2). <https://doi.org/DOI:10.30656/lontar.v9i2.4071>
- Machmudah, L., Puspitasari, R. P., & Mahardika, S. (2024). Etika dalam Praktik Kelembagaan Humas di Era Digital: Tantangan dan Tren di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. *Ilmu Pendidikan : Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 9(2), 50–59. <https://doi.org/doi:10.17977/um027v9i22024p50-59>
- Meng, J., & Berger, B. . (2022). . The role of the institutional environment in building communication professionals' trust and satisfaction: A moderated multiple-mediation analysis. *Corporate Communications: An International Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.11>

- 08/CCIJ-03-2021-0030
- Nugraha, A. R., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PROfesi Humas*, 6(2), 286–310. <https://doi.org/DOI:10.24198/prh.v6i2.3709>
- Pandiangan, C. U. A., & Ratnasari, E. (2023). Humas Pemerintah Dan Transparansi Informasi Untuk Membangun Kepercayaan Publik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 155–168.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721>
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjafirah, N. A. (2020). Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23528>
- Setyaningrum, L. I., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus OPD Kota Palu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Solihah, R. (2024). *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah*. Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). In *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2022). Metodologi Penelitian. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 1–20.
- Yolandita, F., Kinasih, S., Naryoso, A., & Luqman, Y. (2023). Strategi Public Relations Pt. Telekomunikasi Indonesia Tbk Dalam Mempertahankan Reputasi Perusahaan Dan Menciptakan Ekosistem Digital Yang Sehat Serta Inovatif Melalui Indonesia Telecommunication And Digital Research Institute (ITDRI). In *Journal Ilmu Komunikasi*. Universitas Diponegoro.